

**PARTISIPASI MASYARAKAT LOKAL
DALAM MENGEMBANGKAN KAWASAN WISATA KELUARGA
(Studi Kasus Kawasan Wisata Pantai Purus Padang)**

Delmira Syafrini, Nora Susilawati, dan Mira Hasti Hasmira

Universitas Negeri Padang

Abstrak

Pembangunan dan perkembangan suatu daerah menjadi kawasan wisata tidak bisa dilepaskan dari partisipasi aktif masyarakat lokal. Hal serupa juga menjadi kajian yang sepatutnya dilakukan pada pengembangan Kawasan Wisata keluarga Pantai Purus Padang. Partisipasi aktif masyarakat lokal, dilakukan dalam tahap perencanaan maupun tahap pelaksanaan. Partisipasi masyarakat lokal tersebut diantaranya: 1) Tahap perencanaan. Pada tahap ini partisipasi masyarakat Purus diwujudkan dalam beberapa bentuk yaitu; a) Ikut serta dalam sosialisasi pengembangan wisata Purus menjadi wisata keluarga, b) Mendukung program pemerintah Purus menuju terbentuknya Pantai Wisata Keluarga. 2). Tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan ini peran serta masyarakat lokal diantaranya; a) Masyarakat lokal sebagai prioritas utama dalam pemanfaatan pantai sebagai sumber mata pencarian. b) Menjaga kelestarian pantai dari perilaku negatif pengunjung. c) Membangun image positif kawasan Purus sebagai kawasan wisata religius dan berbudaya. d) Ikut serta dalam berbagai pelatihan menuju terbentuknya masyarakat Purus yang sadar wisata.

Kata Kunci: *partisipasi; masyarakat local; kawasan wisata keluarga*

Abstract

The development of a tourist area can not be separated from the active participation of local communities. As on the development of Tourism family area in Purus Beach Padang. A active participation of local communities, in the planning phase and the implementation phase. Participation of local communities include: 1) The planning stage. including a) Participate in the socialization process b) Supporting the government program, Purus towards of Family Travel Beach. 2). The implementation stage. During the implementation phase of this local community participation including; a) Local communities as a priority in the use of the beach as a source of livelihood. b) Controlling Purus Area is form negative visitors behavior. c) Build a positive image Purus as a tourist area of religious and cultural. d) Participation in various training to be the establishment of conscious-community.

Keywords: *participation; local communities,; family tourism area*

Pendahuluan

Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki Sumber Daya Alam melimpah dan potensi keindahan alam dan budaya yang sangat mempesona.

Dengan kekayaan keindahan alam dan budayanya, Sumatera Barat sangat potensial dikembangkan sebagai kawasan wisata, baik wisata gunung, bahari maupun wisata ekonomi (*eco tourism*). Atas dasar itu sejak tahun 2005 lalu, pemerintah telah

menetapkan Sumatera Barat sebagai salah satu destinasi/ daerah tujuan wisata utama di Indonesia.

Salah satu lokasi yang menjadi fokus pengembangan wisata Sumatera Barat sejak tahun 2005 hingga saat ini adalah objek wisata pantai yang terletak di Kota Padang. Hal ini karena Kota Padang yang terletak di sepanjang pesisir pantai barat Pulau Sumatera yang menjadikan Kota Padang sebagai kota yang terkenal dengan wisata pantainya. Salah satunya adalah objek wisata pantai Purus Padang, yang terletak di Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang.

Keberadaan Pantai Purus sebagai objek wisata di Kota Padang sangat menarik untuk dikaji saat ini. Hal ini karena perkembangan objek wisata ini 10 tahun terakhir mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Mengingat bahwa Purus yang sebelum tahun 2005 identik dengan perkampungan kumuh milik nelayan yang mayoritas menggantungkan hidup mereka pada pemanfaatan sumber daya laut. Laut bagi mereka adalah sumber kehidupan karena lokasi permukiman yang dekat dengan pantai menunjang kelangsungan aktivitas perekonomian nelayan. Kondisi ini memudahkan nelayan dalam penangkapan ikan dengan waktu yang relatif panjang dan pantai bagi mereka juga berfungsi untuk menjalankan fungsi sosial, seperti tempat berlangsungnya hubungan sosial dan interaksi antara sesama nelayan. Pada saat itu Purus bagi masyarakat Kota Padang, tidak lebih kawasan yang terletak di tengah Kota Padang yang identik dengan 'orang pasie' tempat nelayan menggantungkan hidup mereka dengan melaut. Sehingga waktu itu pantai Purus terkenal dengan pantai yang kotor, kumuh, dengan pasir yang hitam dan pemukiman kumuh yang berada di sepanjang Pantai tersebut.

Hal tersebut tentu sangat berbeda dengan kondisi saat ini. Pantai Purus secara perlahan mengalami perubahan yang signifikan. Deretan perumahan kumuh saat ini diubah menjadi deretan *cafe* dan restoran yang menyajikan berbagai kuliner khas Sumatera Barat yang berasal dari bahan olahan *seafood*. Pasir yang dulunya hitam karena kapal nelayan yang melaut menjadi putih bersih, geliat perekonomian rakyat yang dulunya didominasi nelayan saat ini dikuasai sektor perdagangan. Pantai Purus kini berubah seperti Pantai Kuta Bali yang banyak dikunjungi oleh mayoritas masyarakat yang berwisata ke Kota Padang. Bahkan jumlah pengunjung wisata pun mengalami peningkatan drastis dari tahun ke tahun. Sebelum tahun 2010 jumlah pengunjung wisata ke Kota Padang hanya berkisar 1.4 juta/ tahun, sementara sampai 2010 s/d 2014 rata rata pengunjung wisata ke Kota Padang bisa mencapai 2.5 juta orang pertahunnya. (Padang Dalam Angka, 2014)

Perkembangan Pantai Purus dari tahun ke tahun menjadi pusat destinasi wisata Sumatera Barat tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Berawal dari banyaknya pro kontra dari masyarakat lokal, karena mewujudkan Purus sebagai salah satu destinasi wisata di Sumatera Barat harus melalui serangkaian problematika yang dianggap merugikan masyarakat lokal. Bagaimana tidak, pembersihan Purus dari *streetipe* perkampungan kumuh harus melalui penggusuran lebih kurang 110 KK, yang tinggal di perumahan yang dianggap tidak layak di sepanjang Pantai Purus, dengan ganti rugi yang pada waktu itu menurut mereka tidak sepadan, karena warga hanya diberi ganti rugi sebesar Rp.10 -100 juta/ KK. Bukan hanya kehilangan rumah, tetapi konsekuensi logis dari penerapan pantai wisata adalah larangan nelayan untuk melaut di sepanjang pantai Purus, yang menyebabkan ratusan KK kehilangan mata

pencarian utama mereka. Namun bagi masyarakat lokal pada waktu itu tidak ada pilihan lain, kecuali menerima kondisi dengan bayangan bahwa ketika pantai wisata itu terwujud maka mereka sebagai pihak yang juga akan diuntungkan (Syafrini, 2005).

Berbagai penolakan dari masyarakat pada tahun 2005, tidak berlarut-larut sampai pada tahapan konflik. Pemerintah Kota Padang dengan cepat mampu mengkondisikan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan Purus untuk menerima pembaruan besar pada kawasan tempat mereka hidup dan menggantungkan hidup. Hal ini terbukti dengan berkembangnya kawasan wisata Pantai Purus saat ini menjadi salah satu kawasan wisata keluarga sebagai salah satu *icon* wisata bahari di Kota Padang.

Perubahan dan perkembangan Purus dari kawasan nelayan menjadi kawasan wisata keluarga tentu tidak terlepas dari peran masyarakat lokal yang tinggal di sepanjang pantai. Hal ini karena pembangunan pariwisata disatu daerah sangat ditentukan juga oleh dukungan dan partisipasi masyarakat lokal. Apalagi kawasan wisata Pantai Purus terletak di kawasan padat penduduk yang dulunya merupakan bekas pemukiman warga yang menggantungkan hidupnya pada laut tersebut, tentunya peran serta masyarakat dalam menunjang dan mengembangkan pembangunan merupakan hal penting yang sangat menentukan, karena keberhasilan sebuah pembangunan bukan hanya dilihat dari sisi pembangunan ekonominya saja akan tetapi dilihat dari sisi pembangunan sosial yang mengutamakan pengembangan sumber daya manusia (*human capital*) (Tjokrowinoto, 1996). Bahkan Laporan UNDP *Human Development Report* secara konsisten menunjukkan bahwa pembangunan sosial mendorong pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang tidak

memperhatikan pembangunan sosial tidak akan bertahan lama. (Soeharto, 2006).

Pentingnya partisipasi masyarakat lokal dalam pembangunan pariwisata terlihat di beberapa daerah di Indonesia. Seperti pariwisata Pulau Bali yang mengkombinasikan antara wisata alam, budaya dan religi dengan memanfaatkan kekayaan pengetahuan dan potensi masyarakat lokal dalam menunjang kemajuan pariwisata di Pulau Bali. Sehingga antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan, *stakeholder* sebagai pemilik modal dan masyarakat sebagai penduduk lokal saling bersinergis satu sama lainnya, sehingga keuntungan bukan hanya milik satu pihak tetapi semua pihak yang terlibat. Dampaknya perkembangan pariwisata akan berpengaruh signifikan pada pendapatan masyarakat lokal.

Belajar dari keberhasilan pembangunan pariwisata di beberapa daerah di Indonesia yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, maka Kota Padang juga mulai mengembangkan pariwisata dengan mempertimbangkan aspek potensi masyarakat lokal. Hal ini karena syarat pembangunan pariwisata saat ini harus memperhatikan tiga paradigma utama yaitu a). *Economically Vable* yaitu, meningkatkan kesempatan kerja, pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat. b). *Socially Acceptable* yaitu mewujudkan keadilan sosial, melestarikan dan memperkokoh jati diri bangsa dan nilai-nilai agama. c). *Environmentally sustinable*, yaitu memperhatikan kelestarian lingkungan dan berkesinambungan.

Berdasarkan paradigma di atas maka pembangunan berbasis masyarakat (*community based tourism*) syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam pembangunan pariwisata di suatu daerah, termasuk dalam pembangunan Pantai Wisata Purus di Kota Padang. Masyarakat hendaknya dipandang sebagai subjek yang aktif bukan hanya sebagai objek dari pembangunan. Dengan

demikian masyarakat setempat berperan aktif dalam merencanakan dan memanfaatkan sumber daya lokal dalam menunjang pembangunan pariwisata, sehingga pariwisata pantai Purus berkembang pesat hingga saat ini, bukan menjadi aktor yang dieksploitasi dan dirugikan.

Dinamika perkembangan pariwisata di Pantai Purus Kota Padang inilah yang menarik untuk dikaji saat ini. Hal ini karena Pantai Purus menjadi objek wisata seperti saat ini melewati berbagai problematika dalam pembangunannya dalam kaitannya dengan masyarakat lokal. Sehingga Purus yang semula identik dengan kawasan nelayan, saat ini menjelma menjadi kawasan wisata yang sangat diperhitungkan baik oleh masyarakat Sumatera Barat maupun dari luar Sumatera Barat. Hal ini diasumsikan tidak terlepas dari peran serta masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata di daerah tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan objek wisata keluarga di Pantai Purus Padang?

Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Konsep pemberdayaan merupakan salah satu alternatif pemecahan berbagai permasalahan yang terjadi dalam masyarakat dewasa ini. Konsep ini merangkul nilai-nilai sosial yang mencerminkan paradigma baru pembangunan yang bersifat “*people-centered, participatory, empowering, and sustainable*” (Chambers, 1995). Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut, yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan dimasa yang

lalu. Konsep ini berkembang dari upaya banyak ahli dan praktisi untuk mencari apa yang antara lain oleh Friedmann (1992) disebut *alternative development*, yang menghendaki “*inclusivedemocracy, appropriate economic growth, gender equality and intergenerational equity*”.

Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Dalam konsep pemberdayaan, manusia adalah subyek dari dirinya sendiri. Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan kemampuan kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya.

Edi Suharto (2006) juga mengungkapkan bahwa pada prinsipnya pemberdayaan masyarakat juga diperlukan dalam pembangunan nasional di suatu negara bangsa (*nation state*) memiliki tiga tugas utama yakni pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) perawatan masyarakat (*community care*) dan pengembangan manusia (*human development*). Fungsi pertumbuhan ekonomi mengarah pada usaha untuk memperoleh pendapatan finansial untuk membiayai pembangunan. Fungsi perawatan menyangkut pelayanan dan perlindungan terhadap keselamatan dan kelangsungan kehidupan warga negara (seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan), sementara fungsi pengembangan manusia mengarah pada peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam rangka penyediaan tenaga kerja berkualitas yang pada dasarnya juga mendukung jalannya pembangunan. Dalam rangka mencapai pembangunan nasional

yang optimal maka ketiga aspek di atas harus dijalankan secara seimbang karena fungsi perawatan dan pengembangan manusia inilah yang merupakan substansi pembangunan sosial yang menopang pembangunan ekonomi.

Berbagai studi memberi pesan yang sangat jelas bahwa negara yang kuat dan sejahtera adalah negara yang memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan sekaligus memiliki komitmen menjalankan pembangunan sosial. Laporan UNDP *Human Development Report* secara konsisten menunjukkan bahwa pembangunan sosial mendorong pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang tidak memperhatikan pembangunan sosial tidak akan bertahan lama.

Banyak konsep pembangunan di negara berkembang menemui kegagalan karena memisahkan pembangunan sosial dengan pembangunan ekonomi. Sektor-sektor yang dikelompokkan dalam bidang sosial seperti pendidikan dan kesehatan menjadi terabaikan dan terkalahkan oleh sektor ekonomi. Padahal terbukti bahwa pembangunan negara-negara industri baru berhasil karena penekanan yang diberikan pada bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Bahkan Gary Becker pemenang nobel tahun 1992 memelopori apa yang disebutnya sebagai *human capital* (modal manusia), dimana investasi modal manusia berupa pendidikan, pelatihan, dan pelayanan kesehatan ini dari berbagai penelitian ternyata menghasilkan sesuatu yang tidak kalah penting dari investasi modal fisik (Kartasasmita, 1996)

Modal manusia inilah yang saat ini dibutuhkan untuk menyukseskan pembangunan di daerah, karena untuk pengolahan sumber daya alam yang melimpah juga harus ditunjang dengan sumber daya manusia yang berkualitas, agar pembangunan yang dilaksanakan di daerah bisa lebih optimal, begitupun untuk

menjawab tantangan globalisasi yang semakin gencar saat sekarang ini, yang dibutuhkan bukan hanya kekuatan sektor perekonomian saja, tetapi juga kualitas sumber daya manusia yang potensial, kompetitif dan kritis dalam menyikapi tantangan pembangunan yang tidak berpihak pada kesejahteraan rakyat.

Tindakan Individu Sebagai Agen Penggerak Perubahan : Tinjauan Teoritis

Perubahan adalah sesuatu yang wajar dalam masyarakat, karena masyarakat pada hakekatnya bersifat dinamis yang selalu mengalami pertumbuhan ke arah yang lebih kompleks. Akan tetapi melihat perubahan dalam perspektif ilmu sosiologi bukan hanya sekedar melihat apa yang berubah, tapi melihat dibalik atau konsekuensi dari sebuah perubahan melalui tiga dimensi perubahan. Menurut Himes dan Moore (dalam Martono, 2011) tiga dimensi perubahan itu diantaranya:

- a. Dimensi struktural yang meliputi perubahan peranan (baik bertambah atau berkurangnya peranan), perubahan pada struktur sosial dan perubahan pada lembaga sosial.
- b. Dimensi interaksional yang meliputi perubahan pada interaksi, baik intensitas, jarak sosial, ataupun aturan dan pola-pola.
- c. Dimensi kultural yang mengacu pada perubahan inovasi kebudayaan seperti munculnya teknologi baru, terjadinya difusi dan integrasi yang bisa saja memunculkan kebudayaan baru dalam masyarakat

Perubahan sosial memang akan muncul dengan sendirinya seiring dengan pertumbuhan masyarakatnya. Akan tetapi diperlukan campur tangan manusia untuk menentukan arah perubahan, karena manusia memiliki kemampuan untuk menanggapi perubahan, baik sebagai perancang strategi

perubahan maupun sebagai agen perubahan itu sendiri. (Lauer, 1993)

Everatte Hagen dalam gagasannya juga mengungkapkan betapa pentingnya peran individu dalam menentukan arah perubahan, terutama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Menurut Hagen (dalam Lauer: 1993) individu yang bisa membawa perubahan adalah individu kreatif yang didalam dirinya memiliki kemampuan untuk melahirkan daya cipta (inovatif), memanfaatkan skill dan pendidikannya untuk menciptakan sesuatu yang baru, sehingga memiliki pengaruh positif bagi kehidupan masyarakat disekitarnya. Individu kreatif menurut Hagen adalah individu yang didalam dirinya memiliki jiwa agresif yang tidak hanya mensejahterakan dirinya tapi juga orang lain disekitarnya sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat. Tindakan individu ini bisa membawa perubahan dalam masyarakat ke arah perubahan yang bersifat progresif, karena individu mampu berfikir rasional dan memilih cara yang efektif untuk dirinya dan lingkungan sekitarnya.

Untuk memahami partisipasi masyarakat dalam pembangunan, konsep partisipasi digunakan untuk menjelaskan keikutsertaan seseorang atau masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan B. Davis seorang sosiolog (dalam Huneryager dan Heckamnn, 1967) menjelaskan bahwa *“participations is defined as an individuals mental and emotional involvement in a group situatiuon that encourages him to contribute to group goal and to share responsibility for them”*.

Nelson, Bryant dan White (1982) mengungkapkan bahwa pentingnya partisipasi masyarakat lokal dalam mengambil bagian peran dalam suatu program pembangunan, baik secara kelompok/kolektif maupun individu, partisipasi secara vertikal atau horizontal. Partisipasi kolektif/kelompok adalah

keterlibatan kelompok atau masyarakat sebagai satu kesatuan, sedangkan partisipasi individual adalah keterlibatan individu dalam kegiatan kelompok (Davis, dalam Huneryager dan Heckmann (1967)). Partisipasi secara vertikal adalah kondisi tertentu dimana masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pembangunan yang mana masyarakat berada pada posisi sebagai bawahan, pengikut atau klien. Sedangkan partisipasi horizontal merupakan partisipasi yang melibatkan langsung masyarakat dalam merancang, melaksanakan dan mengevaluasi program pembangunan suatu wilayah.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Purus, Kecamatan Padang Barat Kota Padang. Alasan dipilihnya lokasi ini karena kawasan pantai di Kelurahan Purus adalah salah satu kawasan wisata pantai di Kota Padang yang terus mengalami perkembangan hingga saat ini, dan dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Metode ini dipilih karena lebih mampu menemukan definisi situasi dan gejala sosial dari subyek, perilaku, motif-motif subyektif, perasaan dan emosi orang yang diamati, merupakan definisi situasi subyek yang diteliti. Maka subyek akan dapat diteliti secara langsung. Selain itu metode ini dapat meningkatkan pemahaman peneliti terhadap cara subyek memandang dan menginterpretasikan kehidupannya, karena itu berhubungan dengan subyek dan dunianya sendiri bukan dalam dunia yang tidak wajar yang diciptakan oleh peneliti.

Sedangkan tipe penelitian yang digunakan adalah studi kasus instrinsik. Studi kasus ini dipilih karena diperlukan untuk memahami sebuah kasus secara spesifik, orang-orang tertentu, kelompok dengan karakteristik tertentu, atau situasi

unik secara mendalam. Menurut Stake (dalam Denzin & Lincoln, 1994), studi kasus instrinsik digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dari kasus yang khusus, hal ini disebabkan karena seluruh kekhususan dan keunikan kasus itu sendiri menarik perhatian. Dalam memilih informan peneliti menggunakan teknik sampel bertujuan (*Purposive Sampling*) yaitu pengambilan informan didasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu (Singarimbun, 169). Kriteria informan penelitian adalah masyarakat asli Purus yang tinggal menetap di sekitar lokasi wisata Pantai Purus. Informan dalam penelitian ini diantaranya adalah 1 orang pihak Dinas Pariwisata, 1 orang pihak Kelurahan Purus, 2 orang Pemuda Purus, 4 orang pengunjung, 6 Pedagang di kawasan Pantai Purus, 6 orang masyarakat lokal Purus.

Pantai Purus Padang; Dari Kawasan Kumuh Menjadi Kawasan Wisata Keluarga

Kawasan Pantai Purus saat ini dikenal dengan kawasan pantai wisata yang sangat banyak dikunjungi wisatawan. Kawasan Pantai ini diresmikan pada tahun 2008 lalu oleh Dinas dan Kebudayaan Pariwisata Kota Padang. Kondisi ini berbeda dengan 10 tahun yang lalu, karena hingga tahun 2005 Purus dikenal dengan pantai yang identik dengan kawasan pemukiman kumuh milik nelayan, yang dimanfaatkan untuk kawasan penangkapan ikan oleh sekitar 34% penduduk yang tinggal di sekitar kawasan ini. Bahkan di sepanjang pantai Purus dihuni setidaknya oleh 110 KK yang mendirikan perumahan liar semi permanen yang jauh dari kondisi bersih dan sehat.

Permukiman liar di sepanjang pantai Purus Kecamatan Padang Barat, ditempati oleh keluarga nelayan. Rumah dari keluarga di permukiman ini dibuat dari papan atau

kayu yang saling berhimpitan antar satu sama lain. Mereka tidak memiliki sertifikat atau hak untuk pemilikan rumah tersebut, yang disebut sebagai permukiman atau perumahan liar.

Sebagian nelayan Purus hidupnya sangat tergantung kepada kondisi alam. Pendapatan mereka sangat ditentukan oleh baik buruknya cuaca pada saat menangkap ikan, sehingga ketika cuaca buruk atau masa “ombak gadang”, penghasilan mereka pun akan turun, karena sedikitnya penghasilan yang diperoleh. Untuk mengantisipasi itu sebagian rumah tangga nelayan, menambah penghasilan mereka dengan mengandalkan keterampilan yang dimiliki istri sebagai ibu rumah tangga, seperti; jualan dan bekerja sebagai tukang cuci.

Kehidupan seperti inilah yang selama ini dijalani komunitas nelayan Purus, yang bermukim di pinggir pantai. Selain sebagai tempat untuk mencari mata pencarian hidup, lingkungan pantai bagi mereka juga berfungsi untuk menjalankan fungsi sosial, seperti tempat berlangsungnya hubungan sosial dan interaksi antara sesama nelayan. Namun kebijakan pemerintah, dalam pembangunan kota telah menempatkan mereka pada sisi lain yang jauh berbeda. Permukiman yang selama ini mereka tempati digusur dan rutinitas yang selama ini mereka jalankan harus mereka tinggalkan, dengan ganti rugi yang ditetapkan sesuai dengan keadaan fisik rumah mereka. Hingga sejak penggusuran tersebut Purus pun dibenahi menjadi Pantai Wisata dengan harapan mampu menjadi icon wisata Kota Padang, dan meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar Purus.

Dalam perkembangannya Pantai Purus berubah menjadi pantai wisata, yang dimanfaatkan warga sebagai salah satu sumber matapencarian mereka untuk berdagang, perlahan penolakan penggusuran yang dilakukan oleh nelayan redam seiring

menggeliatnya sektor perdagangan di sekitar Pantai Purus. Pantai yang dulunya dipenuhi pemukiman warga dan sampah bekas melaut berubah menjadi tempat berkembangnya sektor informal, yang ditandai dengan banyaknya kios-kios dan payung-payung ceper warna warni sebagai ciri khas kawasan ini. Namun dengan keberadaan Purus sebagai Pantai Wisata, Purus diidentikan dengan Pantai yang berkonotasi negatif karena dijadikan tempat berbuat maksiat oleh wisatawan dikarenakan tenda payung yang digunakan tersebut, pada malam harinya digunakan untuk wisatawan untuk melakukan hal-hal negatif. Padahal dalam rencananya tenda payung tersebut tidak diperuntukkan untuk bisa menutupi perbuatan yang dilakukan wisatawan di dalamnya, melainkan untuk melindungi wisatawan dari teriknya sinar matahari pada siang hari, dan jika hujan pada malam hari. Tenda payung yang bisa diubah-ubah ukurannya ini pada malam harinya diubah menjadi sedikit pendek dari ukuran tenda payung biasa atau diistilahkan dengan "Payuang Ceper", jika wisatawan sedang duduk didalamnya maka yang terlihat cuma sedikit bagian pinggang ke bawah, sedangkan bagian pinggang ke atas tertutupi oleh tenda payung tersebut. Kondisi seperti ini memungkinkan para wisatawan melakukan hal-hal negatif (perbuatan maksiat) di bawahnya.

Kondisi yang seperti ini membuat Pantai Purus menjadi pantai yang mempunyai *image* yang negatif di mata masyarakat pada umumnya. Untuk mengatasi kondisi seperti ini, pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang turun tangan. Pihak Dinas mengajak dan mengumpulkan para pedagang dan memberikan mereka berbagai pelatihan tentang Pariwisata. Seperti mengenalkan dan mengajarkan mereka Sapta Pesona Pariwisata, yang antara lain menyangkut

tentang bagaimana melayani wisatawan, ukuran kebersihan, standar harga makanan, suasana tempat yang menarik dan nyaman bagi wisatawan. Sehingga dapat terwujud Visi dan Misi Pariwisata Kota Padang, dengan visi dan Misi Pariwisata Kota Padang yaitu sebagai berikut:

Visi

Menjadikan Kota Padang sebagai Daerah Tujuan Wisata yang berkualitas, yang ramah lingkungan dengan tetap Menjunjung Tinggi Adat dan Budaya Minangkabau (*Adat basandi Sarak, Sarak basandi Kitabullah*).

Misi

1. Melindungi, Memulihkan dan Menata Potensi Objek Wisata yang ada melalui konsep pengembangan yang kerkesinambungan.
2. Memelihara Nilai-nilai ajaran agama, adat istiadat, dan seni budaya daerah.
3. Mencari Peluang Pasar dan Investasi baik Dalam Negeri maupun Luar Negeri.
4. Menggalang Apresiasi, Partisipasi dan Kontribusi Masyarakat Banyak terhadap Peningkatan dan Pengembangan Usaha Kepariwisataan.

Berdasarkan visi dan misi di atas jelaslah bahwa sasaran pariwisata Kota Padang, khususnya kawasan Pantai Purus bertujuan untuk membentuk kawasan wisata yang ramah lingkungan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bahkan untuk mewujudkan visi dan misi tersebut setiap tahunnya pihak Dinas Pariwisata mengajak para pedagang yang berada diseluruh kawasan Pantai Padang termasuk pedagang Pantai Purus secara bergiliran untuk melakukan Studi Banding. Sebelumnya para pedagang ini telah dikelompokan oleh pihak Dinas Pariwisata menjadi 10 kelompok yang

diatur jadwalnya untuk melakukan Studi Banding ke luar daerah, dengan dibiayai oleh pemerintah, karena program Studi Banding ini termasuk ke dalam anggaran Pemerintah Kota Padang untuk memperbaiki wisata Pantai Padang. Pada tahun kemaren pihak Dinas melakukan studi banding ke daerah Kepulauan Riau yang juga mempunyai Pariwisata yang cukup indah. Pihak Dinas menjelaskan kepada pedagang bagaimana sebenarnya Pariwisata yang sehat itu, dengan melihat kondisi dan kenyataan di daerah lain, dan membedakannya dengan daerah sendiri.

Peringatan keras kepada para pedagang supaya tidak lagi untuk memasang tenda Payung dengan ukuran yang sangat rendah juga dilakukan oleh pihak Dinas. Mereka harus siap menerima sanksi dari Dinas dan pedagang yang lain jika melanggar aturan-aturan yang telah dikeluarkan Dinas pariwisata Kota Padang. Seperti yang dituangkan mereka dalam sebuah surat pernyataan tertulis. Jika setelah diperingatkan, para pedagang masih juga memasangnya dengan ukuran rendah, maka para pedagang tidak akan diizinkan lagi untuk berdagang di sana. Satu pedagang yang berbuat maka keseluruhan pedagang akan kena dampaknya. Akhirnya diperoleh kesepakatan pada bulan Mei 2011, dengan perjanjian tertulis di atas materai antara para pedagang dengan pihak Dinas bahwa tanpa mengurangi ciri khas Pantai Purus, tenda payung masih bisa dipakai untuk siang harinya dengan harus ukuran standar. Sedangkan pada malam harinya, setelah usai shalat magrib, tenda payung tidak boleh dibuka, dan harus ditutup serapat-rapatnya, di pasang lampu yang terang di sekitar tempat duduk tamu, demi kenyamanan dan menghindari perbuatan-perbuatan negatif para wisatawan.

Penataan dan pengelolaan ini akan dirancang senyaman mungkin, seindah mungkin dan seaman mungkin, demi tercipta

kawasan pantai Pantai Purus yang bersih, tertata rapi dan jauh dari maksiat. Dalam kurun waktu 3-6 bulan ke depan penataan dan pengelolaan akan selesai dilaksanakan. Lebih kurang ada sekitar 80 orang jumlah pedagang di Pantai Purus, 30 orang diantaranya menjadi binaan PT. Semen Padang dan untuk 50 orang pedagang lagi penataan dan pengelolaannya sedang dipersiapkan oleh Dinas Pariwisata Kota Padang.

Dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit untuk mempercantik tempat wisata Pantai Padang Sumatera Barat, termasuk Pantai Purus. Untuk itu, pemerintah daerah menyiapkan anggaran sebesar Rp 117 miliar untuk memugar dan membangun sejumlah fasilitas. Sumber dana restrukturisasi Pantai Padang berasal dari APBN sebesar Rp 108 miliar sedangkan sisanya sebesar Rp 9 miliar dianggarkan Pemko Padang. Perbaikan fasilitas Pantai Padang termasuk pembangunan rusunawa (rumah susun), pembangunan jembatan, dan sejumlah pendukung fasilitas umum lainnya. Sejumlah *reefwal* akan dibangun di sekitar pantai yang berfungsi sebagai pemecah gelombang. Proyek mempercantik Pantai Padang menjadi target pemerintah daerah tahun ini. Karena bagaimanapun Kota Padang merupakan gerbang masuk ke Sumatera Barat, serta pembangunan sejumlah fasilitas tersebut tidak akan merugikan perkampungan nelayan di kawasan Pantai Purus. (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang, 2015). Pengembangan Pantai Purus sebagai proyek utama pemerintahan Kota Padang tetap berlanjut hingga saat ini. Bukan hanya sebagai kawasan wisata biasa, tapi ditargetkan menjadi objek wisata keluarga dengan prinsip wisata religius dan ramah lingkungan yang mampu menunjang perekonomian keluarga yang tinggal di sekitar Purus sesuai amanat Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang

kepariwisataan. Pengembangan pantai Purus menjadi Pantai Wisata juga diungkapkan oleh Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah bahwa target pengembangan wisata Padang adalah terbentuknya pantai wisata keluarga yang nyaman. Penataan Pantai Padang dilakukan berkesinambungan, dengan melengkapi berbagai fasilitas. Dilakukan bersinergi dengan berbagai pihak, baik SKPD, camat serta lurah maupun Forkopimda, termasuk partisipasi masyarakat dalam menjaga kawasan pantai. Selain itu, Pemerintah Kota Padang juga akan menertibkan parkir liar dan pengamen yang sering mangkal di kawasan itu guna memberikan kenyamanan kepada setiap pengunjung (Padang Ekspres, 29 Juni 2015).

Konsep kawasan wisata keluarga digagas oleh pemerintah Kota Padang, mengingat selama ini kawasan pantai Purus selalu diidentikkan dengan konotasi negatif, kurang tertata dan seringkali dimanfaatkan sebagai tempat prostitusi oleh pasangan yang belum sah. Sementara pantai ini sangat potensial untuk dijadikan destinasi wisata utama di Kota Padang, karena selain lokasinya yang strategis juga pantainya yang indah dan landai. Untuk itu dua tahun terakhir pemerintah fokus untuk menertibkan pantai dari tempat-tempat yang diduga sebagai tempat prostitusi berkedok warung dan payung, cafe-cafe yang tidak tertata, bahkan parkir liar yang dipatok dengan harga yang relatif tinggi.

Penertiban kawasan Pantai Purus ini berdampak pada perubahan yang signifikan pada kondisi pantai saat ini, seperti lokasi pantai yang lebih luas, cafe yang lebih tertata, parkir yang sesuai tarif serta bebas dari pungutan liar. Untuk melengkapi kawasan pantai maka pemerintah Kota Padang juga membangun danau buatan yang dinamakan Danau Cimpago yang sekaligus dilengkapi dengan Lapau Panjang Cimpago (LPC) sebagai fasilitas bagi masyarakat lokal

untuk berdagang secara tertib. Pembangunan LPC merupakan bantuan dari sejumlah perusahaan dan perbankan di Kota Padang, yang hingga saat ini telah tersedia 11 blok LPC yang terdiri dari 110 petak dan bisa menampung 110 pedagang pula. (Minangkabau News, 5 November 2015).

Dalam rangka melengkapi kawasan wisata ini juga dilengkapi dengan arena permainan anak, seperti *banana boat*, *jetski*, *parasailing* dan pembangunan *jogging track* sepanjang 280 meter. Dengan berbagai penataan yang telah dilakukan oleh Pemko Padang, kawasan Purus saat ini mengalami perubahan yang cukup signifikan, lebih indah, tertata serta berdampak pada meningkatnya jumlah pengunjung dari tahun ke tahun, dan berbagai arena permainan diharapkan akan lebih banyaknya keluarga yang memanfaatkan Pantai Purus sebagai tujuan wisata utama yang diharapkan juga akan berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar Pantai Purus Padang.

Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Pengembangan Purus Ssebagai Kawasan Wisata Keluarga

Pengembangan kawasan Pantai Purus dari kawasan pemukiman kumuh yang identik dengan konotasi negatif hingga menjadi kawasan wisata keluarga tidak terlepas dari partisipasi masyarakat yang tinggal di sekitar Purus. Partisipasi masyarakat tersebut ditunjukkan melalui dua tahap, yaitu tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan. Bentuk partisipasi tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan

Pada tahap perencanaan masyarakat di sekitar kawasan Purus dilibatkan dalam beberapa proses pengembangan Pantai Purus sebagai kawasan wisata keluarga, melalui;

a. Ikut Serta dalam Sosialisasi Pengembangan Wisata Purus Menjadi Wisata Keluarga

Untuk mengembangkan kawasan wisata Pantai Purus menjadi kawasan wisata keluarga, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang bersama dengan Kelurahan Purus pertama sekali melakukan penertiban kawasan wisata yaitu relokasi warung-warung yang ada di pinggir pantai. Penertiban ini dilakukan secara bertahap, yang dimulai dari tahun 2014 hingga bulan Desember 2015. Jadi warung-warung yang tidak teratur dan tidak tertib di sepanjang Pantai Purus harus dipindahkan ke tempat baru yang sudah disediakan pemerintah. Dalam mewujudkan relokasi tersebut, diundanglah masyarakat, khususnya pedagang untuk rapat bersama pemerintah, di kantor kelurahan dan mesjid.

Dalam rapat tersebut disampaikan bahwa kawasan Pantai Purus akan dijadikan kawasan wisata keluarga. Hal ini dilakukan karena kondisi kawasan Pantai Purus sebelumnya yang tidak sesuai dengan falsafah masyarakat Minangkabau. Pada masa lalu, kawasan Pantai Purus, lebih banyak dikunjungi oleh muda-mudi yang berpacaran dan cenderung mengarah pada perbuatan maksiat, keadaan tersebut juga didukung oleh pedagang-pedagang disana yang menyediakan payung-payung *ceper* dalam memfasilitasi perilaku berpacaran muda-mudi tersebut.

Sosialisasi kepada masyarakat merupakan hal yang harus dilakukan dalam pengembangan daerah tujuan wisata. Hal ini terkait dengan kesiapan masyarakat untuk terlibat dalam mengelola dan memajukan kawasan wisata tersebut serta kesiapan untuk menerima setiap konsekuensi yang muncul akibat program tersebut. Bentuk sosialisasi yang pertama dilakukan adalah dengan memberikan informasi kepada masyarakat di

sekitar Pantai Purus, bahwa kawasan wisata ini akan ditertibkan dan dirapikan dan dikembangkan menjadi kawasan wisata keluarga. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan agar masyarakat siap menerima berbagai perubahan yang nanti akan muncul sebagai dampak pembangunan, sekaligus mendukung program tersebut agar berjalan sesuai yang direncanakan. Menurut pihak kelurahan sosialisasi ini dilakukan karena merupakan hal utama yang perlu dilakukan agar nanti tidak ada protes dari masyarakat yang merasa dirugikan dengan rencana pengembangan pantai wisata ini.

b. Mendukung Program Pemerintah Purus Menuju Terbentuknya Kawasan Pantai Wisata Keluarga

Berhasilnya pengembangan sebuah kawasan dalam konsep pembangunan tidak terlepas dari dukungan masyarakat lokal. Hal ini karena perencanaan pembangunan akan, terlaksana dengan baik dan bermanfaat jika dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Kartasmita (1996), pembangunan haruslah dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pandangan ini menunjukkan asas demokrasi dalam konsep pembangunan nasional. Masyarakat perlu dilibatkan secara langsung bukan karena mobilisasi, melainkan sebagai bentuk partisipasi yang dilandasi oleh kesadaran. Dalam proses pembangunan, masyarakat tidak semata-mata diperlakukan sebagai obyek, tetapi lebih sebagai subyek dan aktor atau pelaku (Soetomo,2008).

Terkait dengan perencanaan pembangunan dan partisipasi masyarakat, maka suksesnya pembangunan dalam pengembangan Pantai Purus menjadi Kawasan Pantai Wisata Keluarga juga tidak terlepas dari dukungan penuh dari masyarakat lokal yang tinggal di sekitar Purus. Hal ini diketahui dari hasil observasi

dan wawancara yang dilakukan pada masyarakat Purus, bahwa rencana pengembangan Purus menjadi Kawasan Wisata Keluarga oleh masyarakat didukung oleh sebagian masyarakat di sekitar Purus.

Pelaksanaan program pembangunan Pantai Purus menjadi Kawasan Wisata Pantai Keluarga terbilang sukses karena dukungan dari masyarakat. Dukungan ini adalah bentuk partisipasi awal masyarakat, sebagai salah satu syarat pembangunan yang bersifat partisipatif. Hal ini karena partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat mempengaruhi keberhasilan proses pembangunan itu sendiri, karena masyarakat yang mengetahui secara obyektif kebutuhan mereka.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, bukan hanya pada tahap pelaksanaan pembangunan, tetapi juga pada tahap perencanaan berupa dukungan penuh masyarakat terhadap proyek pembangunan. Hal ini sesuai apa yang diungkapkan Soetrisno terdapat dua macam definisi tentang partisipasi rakyat (masyarakat) dalam pembangunan, yaitu: **pertama**, partisipasi rakyat dalam pembangunan sebagai dukungan rakyat terhadap rencana/ proyek pembangunan yang dirancang dan ditentukan tujuannya oleh perencana. Ukuran tinggi rendahnya partisipasi rakyat dalam definisi ini diukur dengan kemauan rakyat untuk ikut bertanggungjawab dalam pembiayaan pembangunan, baik berupa uang maupun tenaga dalam melaksanakan proyek pembangunan pemerintah. **Kedua**, partisipasi rakyat merupakan kerjasama yang erat antara perencana dan rakyat, dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai. Ukuran tinggi rendahnya partisipasi rakyat tidak hanya diukur dengan kemauan rakyat untuk menanggung biaya pembangunan, tetapi juga dengan ada tidaknya hak rakyat untuk ikut menentukan

arah dan tujuan proyek yang akan dibangun di wilayah mereka (Soetrisno, 1995).

2. Tahap Pelaksanaan

Partisipasi masyarakat Purus dalam pengembangan Purus menjadi kawasan pantai wisata keluarga bukan hanya pada tahap perencanaan tapi juga pada tahap pelaksanaan dan realisasi program. Bentuk partisipasi tersebut diwujudkan baik dalam bentuk pemanfaatan pantai sebagai sumber matapencarian, sebagai agen dalam menjaga kelestarian Pantai maupun agen dalam melaksanakan kontrol sosial. Berikut ini bentuk-bentuk partisipasi masyarakat lokal pada tahap pelaksanaan pembangunan Pantai Purus sebagai Kawasan Pantai Keluarga diantaranya:

a) Masyarakat Lokal sebagai prioritas utama dalam pemanfaatan Pantai sebagai sumber matapencarian.

Salah satu indikator keberhasilan sebuah pembangunan tidak terlepas dari pemanfaatan hasil pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena biasanya pembangunan bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat di suatu daerah. Pemanfaatan hasil pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat ini juga terjadi pada pengembangan Pantai Purus sebagai Pantai Wisata Keluarga.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kawasan Pantai Purus sebelum tahun 2005 merupakan pantai yang dimanfaatkan oleh nelayan untuk melaut, yang ditandai dengan dipenuhinya jajaran pantai dengan biduk nelayan untuk melaut, sehingga pantai terkesan kotor dengan pasir yang berwarna hitam dan sampah yang berserakan. Tidak tertatanya kawasan pantai ini juga semakin jelas dengan keberadaan lebih dari 110 KK perumahan liar milik nelayan, yang menambah kesan kumuh

kawasan ini. Namun untuk menjadikan Pantai Purus sebagai salah satu destinasi wisata utama di Kota Padang mengharuskan relokasi nelayan yang tinggal di sepanjang pantai, baik untuk melaut ataupun bermukim disana. Konsekuensi logisnya tentu nelayan kehilangan tempat tinggal dan mata pencarian. Menanggapi kondisi tersebut maka pada waktu itu pemerintah Kota Padang menjanjikan selain ganti rugi sejumlah uang, pantai ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat lokal Purus untuk berdagang yang diharapkan sebagai solusi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarn Purus. Dengan semakin tertata rapinya Pantai Purus, berkonsekuensi pada semakin banyaknya jumlah pengunjung dan secara otomatis juga semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat lokal. Seiring dengan perkembangan Pantai Purus saat ini menjadi kawasan wisata, maka janji pemerintah untuk memfasilitasinya masyarakat lokal untuk berdagang dalam memanfaatkan kawasan Pantai Purus saat ini bisa direalisasikan. Terbukti dengan menjamurnya jumlah pedagang saat ini di sepanjang Pantai Purus, dan mayoritas pedagang adalah penduduk lokal.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal bisa dilihat dari rerata pendapatan mereka dalam keseharian, jika dulu mayoritas mereka hanya mengandalkan pendapatan dari hasil laut yang tidak menentu, sangat ditentukan oleh kondisi cuaca, yang rata-rata mendapat penghasilan bersih Rp. 50.000., saja namun saat ini menurut pengakuan informan mereka bisa mendapatkan penghasilan bersih Rp. 300.000., s/d Rp. 700.000., dalam satu hari.

Dengan berdampaknya pengembangan Pantai Wisata Purus terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, berarti konsep pembangunan kawasan Pantai Purus bukan hanya berupa pembangunan fisik semata tetapi juga terwujudnya konsep

pembangunan sosial. Sebagaimana ungkapan Midgley (1995) bahwa pembangunan sosial adalah proses pembangunan yang direncanakan dan diselaraskan dengan pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat berdasarkan keadilan. Hal yang selaras juga diungkapkan oleh Edi Suharto bahwa pembangunan sosial sebagai suatu pendekatan pembangunan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia secara paripurna, yakni memenuhi kebutuhan manusia yang terentang mulai dari kebutuhan fisik sampai sosial.

Peningkatan taraf hidup masyarakat tersebut tidak dapat dilakukan tanpa adanya keterkaitan dengan pembangunan ekonomi. Jadi pokok pikiran dari Midgley bahwa pembangunan sosial tidak akan dapat dijalankan tanpa adanya keterpaduan dengan pembangunan ekonomi. Perencanaan dalam pembangunan sosial harus juga membuat perencanaan pembangunan ekonomi. Konsep pembangunan sosial inilah yang berhasil diterapkan pada pengembangan Kawasan Wisata Keluarga Pantai Purus, hal ini karena selain berkembangnya berbagai fasilitas wisata dan perdagangan, pembangunan ini juga berimplikasi positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar Purus.

b) Menjaga Kelestarian Pantai dari Perilaku Negatif Pengunjung

Partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan Kawasan Wisata Keluarga juga terlihat pada keterlibatan mereka dalam menjaga kelestarian kawasan pantai, terutama dari perilaku negatif pengunjung yang merusak fasilitas yang telah dibangun oleh pemerintah seperti taman pantai, arena permainan anak, maupun fasilitas lain yang menunjang keindahan pantai. Hal ini karena berbagai fasilitas tersebut sering dirusak oleh para pengunjung, seperti rumput taman yang sering diinjak pengunjung baik ketika

berjalan, istirahat duduk maupun sekedar untuk berfoto.

Perilaku seperti inilah yang ditegur oleh masyarakat sekitar khususnya pedagang lokal. Bagi pengunjung yang masih tidak mau juga mengindahkan teguran dari masyarakat maupun pedagang tersebut, maka masyarakat menyikapinya dengan cara yang lebih keras lagi yaitu menghardik mereka yang melanggar. Selain menegur dan melakukan tindakan yang lebih keras terhadap pengunjung, masyarakat juga terlibat dalam hal menjaga kawasan pantai dari sampah yang berserakan.

Keterlibatan mereka dapat berupa mengingatkan pengunjung untuk tidak membuang sampah sembarangan, memungut sampah, dan membuang sampah pada tempatnya. Bagi para pengunjung yang membuang sampah sembarangan maka pengunjung yang melanggar akan di tegur oleh masyarakat. Umumnya masyarakat yang menegur adalah pedagang yang berjualan di kawasan pantai tersebut.

c. Membangun Image Positif Kawasan Purus Sebagai Kawasan Wisata Religius dan Berbudaya

Membangun citra positif merupakan hal yang sangat penting dalam pengembangan kawasan wisata, karena salah satu penarik bagi wisatawan datang adalah citra yang terbangun dalam masyarakat luas. Kesadaran seperti inilah yang terbangun pada masyarakat Purus saat ini, mereka memahami bahwa kemajuan wisata sangat ditentukan oleh banyaknya pengunjung ke kawasan mereka yang secara tidak langsung akan mempengaruhi perekonomian masyarakat Purus.

Bagi masyarakat Purus membangun image positif ini perlu mereka lakukan, mengingat selama ini Purus selalu diidentikkan dengan kawasan keras dengan

penduduknya yang kasar, pantainya yang kotor, identik dengan kemaksiatan dan pungutan liar. Masyarakat Purus mengakui bahwa untuk mengubah stereotipe seperti ini tentu bukanlah hal yang mudah, tapi beberapa hal telah mereka lakukan. Seperti berperilaku baik dan ramah terhadap pengunjung, meminimalisasi terjadinya pelaku maksiat dengan merubah tempat yang tertutup menjadi terbuka, menjamin kebebasan pengunjung dan pedagang dari pungutan liar.

Kesadaran warga dalam merubah *image* Purus yang selama ini negatif menjadi positif sudah mulai tampak, terbukti dengan sikap ramah tamah kepada pengunjung dan juga ditetapkannya standarisasi harga sebagai tanggungjawab kepada kenyamanan pengunjung. Hal karena selama ini Pantai Purus terkenal dengan kawasan kuliner *seafood* namun dengan harga yang melambung tinggi, sehingga berdampak pada buruknya citra pedagang Purus di mata para pengunjung yang berdampak pada enggan mereka berbelanja di kawasan Pantai ini.

Selain penetapan standar harga dan keramahan sebagai cara membentuk citra positif bagi kawasan wisata Pantai Purus, hal lain yang juga dilakukan oleh masyarakat Purus adalah menghilangkan citra negatif Purus sebagai kawasan maksiat yang selama ini identik dengan '*payung ceper*' yang selama ini identik dengan lokasi mesum yang murah meriah. Sebelum pengembangan pantai Purus sebagai Kawasan Pantai Wisata Keluarga, Pantai Purus memang dipenuhi oleh jajaran tenda dan payung berukuran pendek tempat pengunjung bersantai, dan terbukti tertangkap basah didalamnya terjadi perbuatan yang tidak senonoh baik oleh pasangan remaja ataupun dewasa. Maka menanggapi hal tersebut warga Purus saat ini pun telah berbenah diri untuk merubah citra negatif tersebut, langkah awal yang

dilakukan adalah dengan mendukung pengurusan payung ceper tersebut, dan menggantinya dengan tempat yang lebih terbuka. Bahkan dari pengakuan warga mereka juga ikut menegur pasangan muda mudi yang berpacaran di sekitar Pantai agar tidak berbuat yang tidak senonoh di lingkungan pantai.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah dengan menjadikan kawasan wisata Purus sebagai destinasi wisata keluarga yang religius dan berbudaya, bebas dari maksiat sesuai falsafah hidup masyarakat Minangkabau '*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*' dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal, sehingga citra positif akan melekat pada Pantai Purus sebagai Kawasan Pantai Wisata Keluarga. Bukan hanya dari pemerintah saja tapi terwujudnya Pantai Purus sebagai pantai wisata keluarga juga tidak terlepas dari partisipasi masyarakat lokal yang mendukung dan melaksanakan program tersebut.

Usaha pemerintah dan masyarakat lokal dalam membangun image positif Pantai Purus ternyata cukup membuahkan hasil, terbukti dari hasil observasi yang peneliti lakukan pantai Purus yang dulu dan sekarang jauh berbeda, jika dulu memang terkesan tertutup dan berserakan sehingga tidak memberikan kenyamanan pada pengunjung, namun saat ini beberapa kali peneliti mengunjungi pantai ini baik dalam rangka penelitian atau sekedar berwisata, kondisi jauh berbeda peneliti temui, Pantai Purus saat ini jauh lebih bersih, tertata rapi, dengan pelayanan yang ramah dan sangat minim lokasi tertutup yang memungkinkan tindakan asusila bisa terjadi.

Terkait dengan peran masyarakat sebagai agen perubah, Antonie Giddens juga mengungkapkan bahwa masyarakat menempuh jalan untuk menciptakan dirinya sendiri melalui partisipasi dalam praktek sosial yang terus berlangsung, dimana

peranan individu sebagai agen berjasa dalam memproduksi praktek sosial tersebut. Giddens melihat bahwa praktek sosial yang direpresentasikan pada tindakan manusia itu terjadi secara berulang hingga perulangan itulah yang membentuk kesadaran dan selanjutnya menjadi kebiasaan, dan kembali menjadi struktur yang mengikat tindakan individu tersebut. (Giddens, 2008). Jika dikaitkan dengan partisipasi masyarakat dalam merubah image Pantai Purus dari konotasi negatif menjadi positif adalah praktek sosial yang terus berlangsung karena terciptanya kesadaran masyarakat bahwa citra Pantai Purus dimata masyarakat akan mempengaruhi kemajuan Pantai Purus sebagai salah satu destinasi wisata yang diperhitungkan di Indonesia

d. Ikut Serta dalam Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan

Sejak dijadikannya pantai Purus sebagai kawasan wisata keluarga, pemerintah melakukan pembangunan secara fisik dan non fisik di kawasan pantai tersebut. Pembangunan secara fisik dapat dilihat dari fasilitas yang disediakan seperti pembangunan warung, jembatan, arena bermain anak, taman dan sebagainya. Pembangunan non fisik melakukan penyuluhan dan pelatihan.

Tujuan dilakukannya kegiatan penyuluhan dan pelatihan ini adalah untuk menyiapkan masyarakat menghadapi pengembangan daerah mereka sebagai kawasan wisata. Masyarakat Purus dulunya adalah "urang pasia" yang cenderung berperilaku kasar, tidak ramah, kriminal, dan perilaku negatif lainnya. Untuk itu pemerintah memberikan pengetahuan dan melatih masyarakat di kawasan pantai itu agar berperilaku ramah, tidak kasar, sopan, tidak melakukan pemalakan dan sebagainya

kepada pengunjung wisata di kawasan tersebut.

Masyarakat yang terlibat dalam kegiatan penyuluhan dan pelatihan adalah para pedagang yang merupakan masyarakat lokal di kawasan Pantai Purus. Mereka hadir karena diundang oleh pihak kelurahan dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang. Jika undangan tidak sampai ke tangan mereka, maka masyarakat tidak mau menghadirinya. Ini berarti bentuk partisipasi masyarakat karena dimobilisasi oleh pemerintah.

Adapun kegiatan penyuluhan dan pelatihan yang diberikan oleh pemerintah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang dan Kelurahan Purus Kota Padang adalah pelatihan cara melayani tamu, penyuluhan sosialisasi penyakit masyarakat (Pekat) terhadap pelaku usaha, pelatihan Sadar Wisata dan *workshop* industri kreatif pariwisata. Kegiatan penyuluhan dan pelatihan dimulai pada bulan Oktober hingga bulan November 2010 di Hotel Rumah Nenek, Hotel Hayam Wuruk dan Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang.

Pelatihan cara melayani tamu bertujuan agar masyarakat dapat bersikap ramah dan sopan sehingga dapat menarik kedatangan pengunjung. Masyarakat merasa senang dengan adanya pelatihan ini. Disamping menambah pengetahuan, masyarakat juga dapat memberikan pelayanan yang baik bagi pengunjung.

Penyuluhan Sosialisasi Penyakit Masyarakat (Pekat) terhadap Pelaku Usaha dilakukan agar para pedagang yang berjualan di kawasan pantai tidak memfasilitasi perilaku pengunjung yang berbuat maksiat di warung-warung mereka. Masyarakat justru berperan sebagai kontrol sosial dengan cara mengawasi, memberi teguran dan bertindak

keras terhadap pelaku maksiat di kawasan wisata.

Pelatihan Sadar Wisata. Pelatihan ini dilakukan untuk mewujudkan masyarakat lokal di kawasan Pantai Purus yang sadar wisata. Namun sadar wisata ini tidak akan terwujud hanya melalui pelatihan saja melainkan harus lebih gencar lagi dengan memanfaatkan objek wisata Pantai Purus. Dalam pelatihan, masyarakat diberikan keterampilan seperti keterampilan membuat souvenir, pelatihan usaha kecil menengah serta tata tertib berdagang pada masyarakat.

Workshop Industri Kreatif Pariwisata. Kegiatan *workshop* industri kreatif dilatarbelakangi oleh adanya keterkaitan antara kreatifitas dengan pariwisata dengan mengembangkan industri kreatif. Pengembangan industri kreatif harus melihat hal yang menjadi ciri khas kawasan wisata Pantai Purus.

Masyarakat diberikan pelatihan pemanfaatan barang-barang tidak terpakai yaitu batok kelapa dan kain sisa jahitan untuk dijadikan souvenir dengan melibatkan pelaku usaha pengrajin souvenir. Produk souvenir yang dibuat berupa mainan kunci, celengan, dompet uang receh, wadah minuman dan bross jilbab.

Warga Pantai Purus sangat antusias terhadap program pelatihan tersebut sehingga pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang mengundang pengrajin souvenir yang berasal dari daerah lain untuk datang ke kawasan Pantai Purus. Pengrajin dari daerah lain dijadikan sebagai pendamping pengrajin di kawasan Pantai Purus.

Diharapkan juga kegiatan ini dapat menciptakan lapangan kerja sendiri dan meningkatkan perekonomian masyarakat di kawasan Pantai Purus. Untuk lebih jelasnya rincian pelatihan dan penyuluhan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan Bagi Masyarakat Lokal di Kawasan Pantai Purus

No	Bentuk	Waktu	Peserta	Tempat
1	Pelatihan Cara Melayani Tamu	Oktober 2015	Pedagang	Hotel Rumah Nenek
2	Penyuluhan Sosialisasi Penyakit Masyarakat (Pekat) terhadap Pelaku Usaha	November 2015	Pedagang	Hotel Hayam Wuruk
3	Pelatihan Sadar Wisata	November 2015	Pedagang dan masyarakat lokal	-
4	Workshop Industri Kreatif Pariwisata	November 2015	Pedagang	Kantor Dinas Pariwisata

Sumber : Wawancara dengan Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang.

Berdasarkan tabel 4 di atas, tampak bahwa pemerintah memfasilitasi pedagang dan masyarakat lokal untuk mengikuti pelatihan dan penyuluhan. Kegiatan ini menjadikan masyarakat lebih produktif dan aktif berpartisipasi dalam mengembangkan kawasan pantai Purus.

Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan terungkap bahwa keberhasilan pengembangan Pantai Purus menjadi Pantai Wisata Keluarga tidak terlepas dari partisipasi aktif masyarakat lokal, baik dalam tahap perencanaan maupun tahap pelaksanaan. Partisipasi masyarakat lokal tersebut diantaranya:

1. Tahap Perencanaan

Pada tahap ini partisipasi masyarakat Purus diwujudkan dalam beberapa bentuk yaitu; a) Ikut Serta dalam Sosialisasi Pengembangan Wisata Purus Menjadi Wisata Keluarga b) Mendukung Program Pemerintah Purus Menuju Terbentuknya Pantai Wisata Keluarga

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan ini peran serta masyarakat lokal diantaranya ; a) Masyarakat Lokal sebagai prioritas utama dalam pemanfaatan Pantai sebagai sumber mata pencarian. b) Menjaga Kelestarian Pantai dari Perilaku Negatif Pengunjung. c) Membangun *Image* Positif Kawasan Purus Sebagai Kawasan Wisata Religius dan Berbudaya. d) Ikut serta dalam berbagai pelatihan menuju terbentuknya masyarakat Purus Sadar Wisata.

Daftar Pustaka

- Afrizal, 2005. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Dari Pengertian Sampai Penulisan Laporan*. Padang: Labor Sosiologi FISIP UNAND.
- Chambers, Robert.1987.Pembangunan Masyarakat Desa Mulai Dari Belakang. Jakarta: LP3ES
- Huberman, Michael dan Miles B. Matthew. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta:Universitas Indonesia Press.
- Hunneryager, S.G dan Heckman. 1987. *Human Relation in Management*. New York. South Western

- Friedman, John. 1992. *Empowerment, The Politic of Alternative Development*. Cambridge: Blackwell Publisher
- Danim, Sadarwan. 1988. *menjadi Peneliti Kualitatif*. Pustaka setia : Bandung
- Giddens, Anthony. 2008. *Social Theory Today*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Iqbal, Hasan. 2002 *Metodelogi Penelitian dan Aplikasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kartasasmita, Ginanjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat*. Jakarta: Cides
- Lauer, H, Robert. 1988. *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*. Jakarta: Bian Aksara
- Martono, Nanang. 2011. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers
- Moleong, Lexy. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Transito
- Poloma, Margaret, 1984. *Sosiologi Kontemporer*, CV. Rajawali, Jakarta
- Padang dalam angka.com). diakses tanggal 18 Mei 2015
- Rahcman, Manan. 1999. *Strategi dan Langkah- Langkah Penelitian*. Semarang : IKIP Semarang.
- Ritzer, George. 1992. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada
- Ritzer, George dan Goodman, J. Douglas. 2004. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada Media.
- Singarimbun, Masri dan 1987. *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta
- Soeharto, Edi. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Soetomo. 2006. *Strategi- StrategiPembangunan Masyarakat. Pustaka Pelajar*. Cetakan I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tjokrowinoto, Moeljarto. 1996. *Pembangunan Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar